

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI DALAM PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR WILAYAH KEDUDUKAN NOTARIS

INDUK : STUDI KASUS PUTUSAN MPW NOMOR

2/PTS/MJ.PWN.DKIJAKARTA/XI/2017

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum notaris pengganti yang membuka kantor di luar wilayah kedudukan notaris induk, suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris pengganti seharusnya hanya menjalankan tugas pada wilayah kerja yang sama dengan notaris yang digantikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris pengganti yang membuka kantor di luar wilayah kedudukan notaris induk tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Selain menimbulkan persoalan hukum, tindakan tersebut juga berdampak pada keabsahan akta yang dibuat dan menurunkan kredibilitas profesi notaris di mata masyarakat. Majelis Pengawas Notaris memiliki wewenang penting dalam melakukan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap pelanggaran ini. Penelitian ini menekankan pentingnya ketaatan terhadap peraturan jabatan demi menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Notaris Pengganti, Kantor Cabang, Wilayah Kedudukan, Putusan MPW.

ABSTRACT

**LEGAL RESPONSIBILITY OF SUBSTITUTE NOTARIES IN
ESTABLISHING OFFICES OUTSIDE THE JURISDICTION OF THE
PRINCIPAL NOTARY: A CASE STUDY OF MPW DECISION
NO. 2/PTS/MJ.PWN.DKIJAKARTA/XI/2017**

This study examines the legal liability of substitute notaries who open offices outside the jurisdiction of the notary they are replacing—an action that violates the Indonesian Notary Law (UUJN). Substitute notaries are only authorized to act within the same territorial scope as the notary being substituted. This research employs a normative juridical approach, using data collection methods such as literature review and interviews with relevant parties, including the Regional Notary Supervisory Council. The findings reveal that substitute notaries who open offices outside their designated jurisdiction are not only violating legal norms but may also be subject to administrative, civil, and criminal sanctions. In addition to legal implications, such actions may affect the validity of the deeds they produce and damage the credibility of the notarial profession in the eyes of the public. The Notary Supervisory Council holds a crucial role in monitoring and enforcing discipline in such cases. This study emphasizes the importance of adherence to professional regulations to maintain integrity, professionalism, and public trust in the notarial institution.

Keywords: Substitute Notary, Legal Responsibility, Branch Office, Jurisdiction, MPW Decision.